

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

agoeskamaroellah.stain@gmail.com

ABSTRAK

R. Agoes Kamaroellah, 2017. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan*. Laporan Penelitian Madya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan.

Katakunci: *Kinerja Pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah dan kemampuan kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan selama periode 2013-2016.

Ruang lingkup Penelitian Sesuai dengan data-data yang sumbernya dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan mengenai Kinerja anggaran pendapatan dan rasio kinerja keuangan anggaran pendapatan berdasarkan Analisis varians secara umum menunjukkan bahwa Rasio Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan dapat dikatakan baik.

Hasil penelitian Analisis varians menunjukkan bahwa sebagian besar tahun yang diteliti mengalami selisih lebih atau selisih yang diharapkan. Dikuatkan juga dengan target realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2013-2016 memiliki angka rata-rata sebesar 100,05%.

Derajat Desentralisasi Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka rata-rata 24,16% sehingga dapat dikatakan rendah. Derajat Desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 10,65%, sedangkan Derajat Desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 7,68%. Derajat Desentralisasi Kabupaten Pamekasan termasuk kriteria sangat kurang, karena kriteria Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) berkisar **0,00–10,00 %**. Hal ini ditunjukkan Derajat Desentralisasi pada tahun 2013 **rendah** dengan rata-rata Derajat Desentralisasi sebesar 6,71%. Derajat Desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 8,57%, kemudian pada tahun 2014 dan 2016 terjadi peningkatan yaitu 8,11% dan 8,23% , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2016 sangat tinggi yang ditunjukkan dengan rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah diatas 50%. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 87,30%, sedang tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu

77,30%. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan terhadap pemerintahan pusat atau pemerintahan propinsi.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah secara umum Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan Kinerja Keuangan Pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 8,29% Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai angka 21,46%, sedang pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2016 yaitu -10,87%.

Abstract

R. Agoes Kamaroellah, 2017. Performance Analysis of Revenue and Expenditure Budget Management at the Regional Treasury of the Regency. Pamekasan. High School Research Report of Pamekasan State Islamic High School.

Keywords: Management Performance, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD)

The purpose of this research is to know and analyze the performance of regional income and expenditure budget and ability of budget performance of revenue and expenditure at Regional Finance Board of Pamekasan Regency during period 2013-2016.

Research Scope In accordance with the data source from the Regional Finance Board of Pamekasan Regency on the performance of the income budget and the ratio of financial performance of revenues budget based on Analysis of variance in general shows that the Revenue Financial Performance Ratio of Pamekasan Regency can be said to be good.

The results of the analysis of variance analysis showed that most of the years studied experienced more difference or expected difference. Amplified also with the target budget realization revenue from the year 2013-2016 has an average rate of 100.05%.

The degree of decentralization of Kabupaten Pamekasan shows an average of 24.16%, which can be said to be low. The highest degree of Decentralization occurs in 2016, which is 10.65%, while the lowest Decentralization Degree occurs in 2013, which is 7.68%. The degree of Decentralization of Pamekasan Regency includes very less criteria, because the criteria of Percentage of Pendapatan Asli Daerah (PAD) to Total Revenue Area (TPD) ranges from 0.00-10.00%. This is shown by the degree of Decentralization in the year 2013 is low with average Degree of Decentralization of 6.71%. The highest degrees of Decentralization occurred in 2015 ie 8.57%, then in 2014 and 2016 there was an increase of 8.11% and 8.23%, thus it can be concluded that the government of Pamekasan Regency seeks to increase the Local Revenue (PAD)

Based on the Regional Financial Dependency Ratio it can be said that the level of dependency of Pamekasan Regency in 2013-2016 is very high which is indicated by the average of Local Financial Dependency Ratio above 50%. The highest dependency rate occurred in 2013 which was 87.30%, while the lowest dependency rate occurred in 2016 that was 77.30%. These results indicate that there is dependence of Pamekasan District Government on central government or provincial government.

Analysis of Regional Revenue Growth in general Revenue Financial Performance District Pamekasan experienced an increase in Financial Performance Revenue. This is indicated by the positive growth rate of 8.29%. The highest growth occurred in 2013, reaching 21.46%, while the lowest growth occurred in 2016 at 10,87%.

PENDAHULUAN

Konteks Penelitian

Berhubungan dengan pengelolaan keuangan maka dikeluarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sebagai revisi atas Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dari undang-undang tersebut diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan. Maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah propinsi dan pemerintahan kota. Pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan yang ada. Salah satu perubahan mendasar yang dimaksud adalah penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah.¹

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan, tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran, oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan antar unit kerja yang ada dalam satu unit kerja.²

Menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

¹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi. 2000, hlm 109

² Mardiasmo, *Ekonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI Yogyakarta, 2002, hlm 209

Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Melalui analisis rasio keuangan pemerintah daerah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, dan dapat mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.³

Sebagaimana uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian tentang **"Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan"**.

Fokus Penelitian (1) Bagaimanakah kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan selama periode 2013-2016 ? (2) Bagaimana kemampuan kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan selama periode 2013-2016 ?

Agar dalam pembahasan pokok permasalahan tidak meluas dan lebih terfokus pada: (1) Kinerja pengelolaan anggaran pendapatan daerah yang diteliti hanya dibatasi tentang Analisis Varians Pendapatan Daerah dan rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. (2) Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada data periode tahun anggaran 2013 - 2016.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan mengadakan penelitian ini antara lain: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan selama periode 2013-2016. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah selama periode 2013-2016.

Manfaat penelitian terbagi atas : (1) Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai

³ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*,. Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm.201

pengukuran kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; (3) Bagi pemerintah daerah dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran didalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kineja dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Menilai kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melihat secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 pasal 1 ayat 5 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antara daerah dengan yang lainnya, terutama dalam kemampuan keuangan daerah, antara lain.⁴ (1) Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah. (2) Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah (3) Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan (4) Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah

⁴ Nataluddin. Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerah di Propinsi Jambi, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN. 2001, hlm 167

“Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut:⁵ (1) Pola Hubungan Instruktif (2) Pola Hubungan Konsultif (3) Pola Hubungan Partisipatif (4) Pola Hubungan Delegatif

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 157 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 6, serta PP No. 105 tahun 2000 dan PP No 64 tahun 2000, sumber-sumber penerimaan dapat diperinci sebagai berikut:

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkannya sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan yang dilaporkan berupa data sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 - 2016

Tabel 4.1.APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016 (dalam Rupiah)

Tahun	APBBD		Surplus/Defisit
	Anggaran Pendapatan	Anggaran Belanja	
2013	1.199.763.351.402.53	1.322.879.723.920.50	(69.063.751.000)
2014	1.457.260.755.011.85	1.646.028.688.978.72	(188.767.933.966,87)
2015	1.668.382.245.156.29	1.985.573.806.517.95	(317.191.561.361.66)
2016	1.927.866.686.024.00	2.163.598.999.889.00	(235.732.313.865)

Sumber : BKD Kab. Pamekasan

Tabel 4.2. Realisasi APBD Kabupaten Pamekasan 2013-2016 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi APBD		Surplus/Defisit
	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	
2013	1.219.849.024.308,55	1.167.571.677.040.03	52.277.347.268.52
2014	1.527.493.494.940.97	1.385.107.527.776.00	1.388.975.967.164.97
2015	1.681.794.669.633.19	1.751.155.310.591.52	(69.360.640.958.33)
2016	1.827.846.755.474.84	1.864.638.211.688.95	(36.791.456.214.11)

Sumber : BKD Kab. Pamekasan

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2014 Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengalami surplus anggaran masing-masing sebesar Rp. 52.277.347.268.52 dan Rp. 1.388.975.967.164.97, sedangkan pada

⁵ Hersey, Paul Kenneth, H. Blanchard, dan Dewey E. Johnson. Management of Organization. New Jersey: Prentice Hall International Inc.2001

tahun 2015-2016 mengalami defisit anggaran masing-masing sebesar Rp. 69.360.640.958.33 dan Rp. 36.791.456.214.11

Pendapatan Daerah

Definisi tentang Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.⁶

Tabel 4.3 Realisasi Pos-Pos Pembentuk Pendapatan Daerah (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2013	81.876.726.485.53	1.064.971.849.917.00	52.914.775.000.00
2014	123.883.317.295.00	1.219.423.660.716.00	113.953.777.000.00
2015	144.288.155.336.62	1.423.655.866.819.67	100.438.223.000.00
2016	150.538.624.797.00	1.412.950.852.450.00	364.377.208.777.00
Total	1,237,477,362.284.15	5.121.002.229.902.67	631.683.983.777.00

Sumber : BKD Kab. Pamekasan

Tabel 4.4. Analisis Varians Pendapatan Daerah (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan			
	APBD	Realisasi	Selisih	Persentase Realisasi APBD
2013	1,199,763,351,402,53	1,219,849,024,308,55	20,085,672,906,02	101,67%
2014	1,457,260,755,011,85	1,527,493,494,940,97	70,232,739,929,12	104,81%
2015	1,668,382,245,156,29	1,681,794,669,633,19	13,412,424,476,90	100,80%
2016	1,927,866,686,024,00	1,827,846,755,474,84	100,019,930,549,16	94,81%
Total	6,253,273,037,594,67	6,256,983,934,357,55	3,710,896,762,88	100,05%

Sumber: Data Diolah (2017)

Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi *fiscal*) mewujudkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan

⁶ Halim Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat 2007, hlm 99

pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat / Propinsi Dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui hubungan situasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada empat pola hubungan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut :⁷

Tabel 4.5. Pola hubungan, Kemandirian dan Kemampuan Daerah

Kemampuan keuangan	Rasio Kemandirian %	Pola hubungan
Rendah sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Nadeak, 2003;21

Derajat Kemandirian dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Transfer. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi derajat Kemandirian Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan desentralisasi. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (2011) jika Derajat Desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi. Berikut ini merupakan tabel perhitungan Derajat Desentralisasi.

Tabel 4.6. Derajat Kemandirian (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Derajat Kemandirian (%)
2013	81.876.726.485.53	1.064.971.849.917.00	7,68%
2014	123.883.317.295.00	1.219.423.660.716.00	10,15%
2015	144.288.155.336.62	1.423.655.866.819.67	10,13%
2016	150.538.624.797.00	1.412.950.852.450.00	10,65%
Total	1,237,477,362.284.15	5.121.002.229.902.67	24,16%

Sumber: Data diolah (2017)

⁷ Nadeak, Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, FE, Universitas Sanata Dharma, 2003 hlm 21

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dikatakan bahwa Derajat Kemandirian Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2016 dalam kategori **rendah sekali** dapat ditunjukkan dengan rata-rata Derajat Kemandirian dengan rasio kemandirian sebesar **0-25%** Derajat Kemandirian tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 10,65%, sedangkan Derajat Kemandirian terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu 7,68%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan belum mampu menyelenggarakan desentralisasi.

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dilihat dari perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). “Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:⁸ **Derajat Desentralisasi = Pendapatan Asli Daerah/Total Pendapatan Daerah X 100%**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel.4.6 berikut ini:

Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:7)

⁸ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Erlangga.2010, hlm 142

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (2011) jika Derajat Desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi. Berikut ini merupakan tabel perhitungan Derajat Desentralisasi:

Tabel 4.7. Derajat Desentralisasi (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi (%)
2013	81.876.726.485.53	1,219,849,024,308,55	6,71%
2014	123.883.317.295.00	1,527,493,494,940,97	8,11%
2015	144.288.155.336.62	1,681,794,669,633,19	8,57%
2016	150.538.624.797.00	1,827,846,755,474,84	8,23%
Total	1,237,477,362.284.15	6,256,983,934,357,55	19,77%

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dikatakan bahwa Derajat Desentralisasi Kabupaten Pamekasan termasuk kriteria **sangat kurang**, karena kriteria Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) berkisar **0,00 – 10,00 %**. Hal ini ditunjukkan **Derajat Desentralisasi** pada tahun 2013 **rendah** dengan rata-rata Derajat Desentralisasi sebesar 6,71%. Derajat Desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 8,57%, kemudian pada tahun 2014 dan 2016 terjadi peningkatan yaitu 8,11% dan 8,23% , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut.⁹

⁹ Ibid, hlm 142

$$\text{KKD} : \frac{PT}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :
 KKD : Ketergantungan Keuangan Daerah
 PT : Pendapatan Transfer
 TPD : Total Pendapatan Daerah

“Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan)”¹⁰.

KRITERIA PENILAIAN KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH

Prosentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (2011) jika Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah. Berikut ini merupakan tabel perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah:

Tabel 4.8. Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah
2013	1.064.971.849.917.00	1,219,849,024,308,55	87,30%
2014	1.219.423.660.716.00	1,527,493,494,940,97	79,83%
2015	1.423.655.866.819.67	1,681,794,669,633,19	84,65%
2016	1.412.950.852.450.00	1,827,846,755,474,84	77,30%
Total	5.121.002.229.902.67	6,256,983,934,357,55	81,84%

Sumber: Data diolah (2017)

¹⁰ Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. 2010. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007*.

Berdasarkan tabel 4.8 perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2016 sangat tinggi yang ditunjukkan dengan rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah diatas 50%. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 87,30%, sedang tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 77,30%. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan terhadap pemerintahan pusat atau pemerintahan propinsi.

Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Analisis rasio keuangan ini merupakan konversi data dari laporan keuangan menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah serta bagi pengambilan keputusan, dengan membandingkan antara 2 (dua) atau lebih item keuangan, biasanya dari tahun yang sama.

Rasio pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode keperiode berikutnya.¹¹

Pengukuran tingkat pertumbuhan Pendapatan daerah dihitung menggunakan formula :

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{PAD_{t-(t-1)}}{PAD_{t-1}} \times 100 \%$$

$$\text{Pertumbuhan PTs} = \frac{PTs_{t-(t-1)}}{PTs_{t-1}} \times 100 \%$$

$$\text{Pertumbuhan PLain} = \frac{PLain_{t-(t-1)}}{PLain_{t-1}} \times 100 \%$$

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

¹¹Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta, 2004, hlm 150

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2014

Tabel 4.9. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2014

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Pendapatan 2013	Realisasi Pendapatan 2014	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	81.876.726.485,53	123.883.317.295,00	42,006,590,809,47	51,30%
Pendapatan Transfer	1.064.971.849.917,00	1.219.423.660.716,00	154,451,810,799,00	14,50%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	52.914.775.000,00	113.953.777.000,00	61,039,002,000,00	115,35%
Total Pertumbuhan Pendapatan	1,199,763.351,402,53	1,457,260,755,011,00	257,497,403,608,47	21,46%

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 51,30% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer mengalami kenaikan 14,50% dari tahun sebelumnya. Lain- lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan sebesar 115,35%, jika dilihat dari Total Pertumbuhan Pendapatan, terdapat pertumbuhan secara positif sebesar 21,46%.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2015

Tabel 4.10. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2015

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Pendapatan 2014	Realisasi Pendapatan 2015	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	123.883.317.295,00	144.288.155.336,62	20,404,838,041,62	16,47%
Pendapatan Transfer	1.219.423.660.716,00	1.423.655.866.819,67	204,232,206,103,67	16,74%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	113.953.777.000,00	100.438.223.000,00	(13,515,554,000,00)	-11,86%
Total Pertumbuhan Pendapatan	1,457,260.755,011,00	1,668,382,245,156,29	211,121,490,145,29	14,48%

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 16,47% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer mengalami kenaikan

16,74% dari tahun sebelumnya. Lain - lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan sebesar 11,86%, jika dilihat dari Total Pertumbuhan Pendapatan, terdapat pertumbuhan secara positif sebesar 14,48%.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2016

Tabel 4.11. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2016

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Pendapatan 2015	Realisasi Pendapatan 2016	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	144.288.155.336,62	150.538.624.797,00	6,250,469,460,38	4,33%
Pendapatan Transfer	1.423.655.866.819,67	1.412.950.852.450,00	(10,705,014,369,67)	-0,75%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	100.438.223.000,00	364.377.208.777,00	263,938,985,777,00	262,78%
Total Pertumbuhan Pendapatan	1,668,382,245,156,29	1,927,866,686,024,00	259,484,440,867,71	15,55%

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.11 di atas Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 4,33% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer mengalami penurunan 0,75% dari tahun sebelumnya. Lain - lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan sebesar 262,78%, jika dilihat dari Total Pertumbuhan Pendapatan, terdapat pertumbuhan secara positif sebesar 15,55%.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2017

Tabel 4.12. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2017 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi Pendapatan 2016	Realisasi Pendapatan 2017	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
Pendapatan Asli Daerah	150.538.624.797,00	146.871.696.103,00	(3,666,928,694,00)	-2,43%
Pendapatan Transfer	1.412.950.852.450,00	1.336.407.865.000,00	(76,542,987,450,00)	-5,41%
Lain-lain Pendapatan yang Sah	364.377.208.777,00	234.902.822.520,00	(129,474,386,257,00)	-35,53%
Total Pertumbuhan Pendapatan	1,927,866,686,024,00	1,718,182,383,623,00	(209,684,302,401,00)	-10,87%

Sumber: Data diolah (2017)

Berdasarkan tabel 4.12 di atas Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 2,43% dari tahun sebelumnya. Pendapatan Transfer mengalami penurunan 5,41% dari tahun sebelumnya. Lain - lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan sebesar 35,53%, jika dilihat dari Total Pertumbuhan Pendapatan, terdapat penurunan sebesar 10,87%.

Analisis Trend Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016

Tabel 4.13. Analisis Trend Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2013-2016 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
2013	1,199,763.351,402,53	1,457,260,755,011,00	257,497,403.609,47	21,46%
2014	1,457,260,755,011,00	1,668,382,245,156,29	211.121.490.145,29	14,48%
2015	1,668,382,245,156,29	1,927,866,686,024,00	259.484.440,868,29	15,55%
2016	1,927,866,686,024,00	1,718,182,383,623,00	(209.684.302.401)	-10,87%
Total	6.253.273.037.593,82	6.771.692.069.814,29	518,419,032,222,11	8,29%

Sumber: Data diolah (2017)

Dari tabel perhitungan di atas, Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah dilihat dari Analisis Pertumbuhan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2016 dikatakan mengalami pertumbuhan positif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu 8,29%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 15,55% sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 10,87%.

Pembahasan

Tabel 4.14. Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan APBD Kabupaten Pamekasan

No	Analisis Kinerja Keuangan	Hasil Penelitian
A	Analisis Varians Pendapatan Daerah	100,05%
B	Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah :	
	1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.	24,16%
	2. Rasio Derajat Desentralisasi	19,77%
	3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	81,84%
	4. Rasio Pertumbuhan (<i>Growth Ratio</i>)	8,29%

Sumber : Data Diolah (2017)

Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis Varians Pendapatan Daerah

Menurut pendapatan Mahmudi, (2010) menyatakan bahwa Analisis Varians Pendapatan dikatakan memiliki Kinerja Keuangan Pendapatan yang baik jika terdapat selisih lebih (realisasi pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan), sedangkan Kinerja Keuangan Pendapatan dinilai kurang baik jika terdapat selisih kurang (realisasi pendapatan kurang dari jumlah yang dianggarkan). Analisis varians secara umum menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan dapat dikatakan baik.

Hal tersebut ditunjukkan dengan sebagian besar tahun yang diteliti mengalami selisih lebih atau selisih yang diharapkan. Dikuatkan juga dengan target realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2013-2016 memiliki angka rata-rata sebesar **100,05%**. Jika dilihat dari empat periode yang diteliti, maka persentase paling tinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu mencapai angka **104,81%**, sedang persentase paling rendah terjadi pada tahun 2016 yaitu **8,46%**. Hasil Penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2010:137) yaitu Pemerintah Kabupaten Pamekasan dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila dapat memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan.

Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Artikel yang diterbitkan Kementerian Keuangan (2011) menyebutkan jika Derajat Desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Kabupaten Pamekasan menunjukkan angka rata-rata **24,16%** sehingga dapat dikatakan rendah. Derajat Desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu **10,65%**, sedangkan Derajat Desentralisasi terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu **7,68%**. Hasil ini mendukung pendapat dari Mahmudi (2010:142) bahwa semakin rendah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka semakin tinggi kemampuan

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (2011) jika Derajat Desentralisasi berada di atas 50% menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi.

Derajat Desentralisasi Kabupaten Pamekasan termasuk kriteria **sangat kurang**, karena kriteria Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) berkisar **0,00 – 10,00 %**. Hal ini ditunjukkan **Derajat Desentralisasi** pada tahun 2013 **rendah** dengan rata-rata Derajat Desentralisasi sebesar 6,71%. Derajat Desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 8,57%, kemudian pada tahun 2014 dan 2016 terjadi peningkatan yaitu 8,11% dan 8,23% , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hasil ini mendukung pendapat dari Mahmudi (2010:142) bahwa semakin rendah kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin rendah kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut artikel yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan (2011) jika Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berada di bawah 50% berarti pemerintah daerah memiliki ketergantungan keuangan daerah yang rendah.

Berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2016 sangat tinggi yang ditunjukkan dengan rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah diatas 50%. Tingkat ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 87,30%, sedang tingkat ketergantungan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 77,30%. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan terhadap pemerintahan pusat atau pemerintahan propinsi. Hal ini mendukung pendapat Mahmudi (2010:142) bahwa semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah kabupaten terhadap pemerintah pusat.

Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Menurut pendapat Mahmudi, (2010) menyatakan bahwa Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah menunjukkan Kinerja Keuangan Pendapatan

cenderung meningkat jika mengalami pertumbuhan secara positif, sedang dikatakan Kinerja Keuangan Pendapatan mengalami penurunan jika mengalami pertumbuhan secara negatif. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah secara umum Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan Kinerja Keuangan Pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu **8,29%** Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai angka **21,46%**, sedang pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2016 yaitu **-10,87%**. Hasil ini mendukung pendapat dari Mahmudi (2010:138) bahwa jika terjadi pertumbuhan yang positif maka menunjukkan terjadi peningkatan Kinerja Keuangan Pendapatan

Bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Pemerintah Kabupaten Pamekasan berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan dengan cara intensifikasi dan extensifikasi berbagai pungutan baik pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Bagi Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lingkup dan kajian tentang kinerja pengelolaan anggaran, karena penelitian ini mengambil kinerja pengelolaan anggaran pendapatan saja dan lokasi penelitian hanya satu Kabupaten yaitu Kabupaten Pamekasan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhim, Mohammad. *Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan Kaitannya dengan Perekonomian Daerah di Kabupaten Sorolangun*. (Thesis S2). Universitas Negeri Jambi.2008
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta.2006
- Bisma, I Dewa Gde & Susanto, Hery. 2010. *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3. Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-3007*.
- Darise, Nurlan, *Akuntansi Keuangan Daerah*, PT. Indeks, Jakarta,2008
- Ghartey dan Crisis, dalam Mardiasmo *Accountability and Development in the Third World* (2000) 2006
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta, 2004

- Hafiz Tanjung Abdul, *Akuntansi Pemerintahan Daerah: Konsep dan Aplikasi*, Cetakan kedua, Alfabeta, Bandung.2008
- Helfert, Erich. *Teknik analisa Keuangan*. Jakarta : Erlangga.2000
- Hersey, Paul Kenneth, H. Blanchard, dan Dewey E. Johnson. *Management of Organization*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.2001
- Indiriandoro , Supomo *Metodologi Penelitian Bisnis* Edisi Pertama Cetakan Kedua. BPFE-Yogyakarta, 2002
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UUP STIM YKPN. Yogyakarta.2007
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Erlangga.2010
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.2005
- Marizka, Addina. *Analisis Kinerja Pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan* (Skripsi S1). Universitas Sumatera Utara. 2009.
- Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, Liberty Yogyakarta,1995
- Mudrajat Kuncoro. *Ekonomi Pembangunan : Teori, masalah-masalah dan kebijakan*. Yogyakarta : UPP YKPN.1997
- Nataluddin. *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerah di Propinsi Jambi*, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN. 2001, hlm 167
- Nadeak, Ruslina. 2003. “Analisis Rasio Keuangan Pada APBD Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah”. Skripsi. Jurusan Akuntansi, FE, Universitas Sanata Dharma
- Nordiawan, Dedy. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta. 2006.
- Nirzawan. *Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara*, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN. 2001
- Rosalina, Eka. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Propinsi Sumatera Barat)*. (Thesis S2). Universitas Gajah Mada. 2008.
- Susanto Azhar, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Pertama. Bandung: Lingga Jaya. 2008.

- Tumilar, R.L.H., "Otonomi Keuangan dan Ekonomi Dati II di Propinsi Sulawesi Utara", Tesis S-2, PPS-UGM, Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).1997
- Widodo. Analisa Rasio Keuangan pada APBD Boyolali, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN. 2001
- Wulandari. Anita. *Kemampuan Keuangan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik Vol 5 No 2* November 2001
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- _____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Perbedaharaan Negara dan Inteprestasinya*.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2006 *tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007*.
- _____, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 *tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah*.

